

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Proses Pemecahan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pemecahan sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang serta untuk mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi serta bagaimana solusi dalam proses pemecahan sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang

Metode penelitian menggunakan pendekatan *juridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : Proses pemecahan sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang, yaitu proses pemecahan sertifikat hak atas tanah dilakukan dengan cara pemohon mengajukan pengukuran tanah terlebih dahulu. Pemecahan sertifikat hak atas tanah bergantung pada keinginan pemohon untuk melakukan pemecahan sertifikat tersebut dan didasarkan pada hasil pengukuran bidang tanah yang bersangkutan. Setelah dilakukannya proses pengukuran, maka hasil dari pengukuran tersebut akan diserahkan kepada seksi hubungan pertanahan dan akan diproses dengan nomor induk yang baru. Proses pemecahan sertifikat hak atas tanah masih dilanjutkan kembali kepada Ka.Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi untuk dilakukan pengecekan serta penandatanganan. Setelah itu diajukan kembali kepada Kepala Seksi Pertanahan untuk ditanda tangani guna menerbitkan sertifikat yang baru. Setelah selesai setiap proses baru sertifikat tersebut dikirim oleh petugas kepada loket penyerahan. Masalah-masalah yang terjadi serta solusi dalam proses pemecahan sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang, yaitu permasalahan yang pertama kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah, solusi yang diberikan adalah melalui Pemberdayaan Masyarakat. Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya Sumber daya manusia atau Pegawai dari Kantor Pertanahan serta Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan, solusi yang diberikan kantor pertanahan adalah yaitu melalui Peningkatan Disiplin Pegawai serta pengajuan penambahan fasilitas penunjang kinerja Kantor Pertanahan kepada Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terakhir adalah Daerah tertentu, dimana daerah tersebut seperti mijen, ngalihan dan gunung pati kebanyakan masih berupa sawah dimana ketika ingin melakukan pemecahan minimal tanahnya seluas 120m², solusi dalam permasalahan ini Kantor Pertanahan Kota Semarang berencana membuat peraturan tentang pembagian ukuran tanah untuk pemecahan sertifikat tanah. Jadi di daerah tersebut tidak harus tanah dengan ukuran minimal 120 m² agar dapat dilakukan pemecahan..

Kata Kunci : Pemecahan, Hak Atas Tanah, Sertifikat.

ABSTRACT

*This research entitled *The Process of Resolving Land Rights Certificates at the Semarang City Land Office*, this thesis aims to determine the process of resolving land rights certificates at the Semarang City Land Office and to find out what problems occur and how the solutions are in the process of solving land rights certificates. at the Semarang City Land Office*

The research method used a sociological juridical approach. Sources of data were obtained from several stages, namely through field research (interviews) and literature research. data analysis in a systematic way including data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The research results of this writing indicate that: The process of resolving land rights certificates at the Semarang City Land Office, namely the process of resolving land rights certificates is carried out by the applicant submitting a land measurement first. The splitting of land title certificates depends on the applicant's desire to split the certificate and is based on the measurement results of the land parcels concerned. After the measurement process is carried out, the results of the measurement will be submitted to the land relations section and will be processed with a new identification number. The process of resolving land rights certificates is still being continued back to the Head of the Sub-Section of Registration of Rights and Information for checking and signing. After that, it is submitted back to the Head of the Defense Section to be signed in order to issue a new certificate. After each new process is completed the certificate is sent by the officer to the submission counter. The problems that occur as well as solutions in the process of resolving land rights certificates at the Semarang City Land Office are the first problem that the community is not aware of the importance of land certificates, the solution given is through Community Empowerment. The next problem is the lack of human resources or employees from the Land Office as well as the limited facilities and infrastructure owned by the Land Office, the solution provided by the land office is through an increase in employee discipline and proposals for additional facilities to support the performance of the Land Office to the Central Government. The last problem is certain areas, where these areas such as mijen, ngaliyan and gunung pati are mostly still rice fields where when you want to solve the minimum land area of 120m², the solution to this problem is the Semarang City Land Office plans to make a regulation on dividing the size of the land for solving land certificates . So in that area, you don't have to have a land with a minimum size of 120 m² so that you can solve it.

Keywords: Splits, Land Rights, Certificates.